

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan upaya paksa penggeledahan oleh Penyidik POLRI terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Tasikmalaya. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan penggeledahan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Metode penyajian data dalam bentuk uraian yang dibentuk secara sistematis.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah Pelaksanaan penggeledahan rumah dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: penyidik memperoleh laporan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya penggeledahan rumah tersangka yang disaksikan oleh dua orang saksi, karena dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri, tetapi setelah selesai melakukan penggeledahan penyidik segera melaporkan dan meminta surat persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hambatan yang umum terjadi dalam penggeledahan rumah yaitu barang bukti disangkal, tersangka mempersulit jalannya penggeledahan, tidak setuju rumahnya digeledah. Upaya mengatasi hambatan yaitu dengan pendekatan intensif, serta dilakukan tindakan tegas agar tersangka mau bekerja sama. Peraturan perundangan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan penggeledahan rumah yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, KUHAP dalam Pasal 1 butir 17, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126 dan pasal 127.

Kata Kunci: Upaya Paksa, Penggeledahan, Penyalahgunaan Narkotika.

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the implementation of forceful measures Investigators searched by Police against drug abuse in the city of Tasikmalaya. To identify any obstacles in conducting a search of cases of drug abuse. To achieve these objectives the writer used normative juridical approach. Specifications of research is a study of the legal synchronization. Method of data presentation in the form of descriptions formed systematically.

The conclusion of the research and discussion is the implementation of house searches in criminal cases of drug abuse is carried out through the following steps: investigators get a report which is then followed up by doing penggeledahan suspect's house which was witnessed by two witnesses, because in urgent circumstances the investigator may conduct a search without Chairman of the Court permits, but after the completion of a search the investigator immediately reported and the consent shakedown of the Chairman of the District Courts. Obstacles are common in house searches are undeniable evidence, the suspect complicate the course of the search, did not agree to her home ransacked. Efforts to overcome the obstacles that with intensive approach, and do act decisively to suspect cooperating. Laws and regulations that can be used as legal basis in the implementation of house raids namely Law No. 8 of 1981 on the Guidelines for the Criminal Procedure Code, the Criminal Procedure Code in Article 1, point 17, Article 7, paragraph 1, letter d, Article 11, Article 33, Article 125, Article 126 and Article 127.

Keywords: Forced efforts, Warrant, Narcotics Abuse.